

BAB IV

SIMPULAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di bawah Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Sebagai salah satu instansi vertikal, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung harus mengikuti pemerintah pusat, termasuk dalam melaksanakan implementasi roll out SAKTI pada satker. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 bahwasanya pada tahun anggaran 2022 seluruh satker di bawah Kementerian/Lembaga lainnya akan sepenuhnya menggunakan aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem yang mengintegritaskan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

KPPN Bandar Lampung melakukan berbagai rencana yang dilakukan dalam melaksanakan implementasi roll out SAKTI yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada satker tentang tata cara penggunaan aplikasi SAKTI, lalu juga KPPN sedang melaksanakan *End User Training* SAKTI kepada 275 satker, serta KPPN Bandar Lampung bekerja sama dengan Kanwil DJPB Provinsi Lampung untuk melaksanakan CSO yang berguna bagi satker untuk berkonsultasi terkait

permasalahan aplikasi SAKTI yang dihadapi. KPPN Bandar Lampung. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan roll out SAKTI pada satker di lingkup KPPN Bandar Lampung salah satunya dengan pembinaan langsung dari Direktorat Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan yang terjun langsung ke seluruh KPPN yang ada di Indonesia.

Aplikasi SAKTI berdasarkan teori dan harapan pemerintah memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya dan dianggap dapat mempermudah proses penganggaran pada satker menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dengan pengumpulan data dari proses wawancara dengan salah satu pejabat fungsional yang ada di KPPN Bandar Lampung, serta mencari data dari internet sebagai acuan penggunaan aplikasi SAKTI, aplikasi SAKTI pada KPPN Bandar Lampung memiliki kelebihan yang sesuai dengan teori dan harapan pemerintah pusat. Akan tetapi, aplikasi SAKTI memiliki kelemahan yaitu sering terjadinya *update* pada aplikasi SAKTI oleh pemerintah pusat pada saat satker sedang melakukan proses *input* data, sehingga mengakibatkan data yang sudah *terinput* menghilang dan harus melakukan *input* ulang. Diharapkan Pemerintah Pusat dapat memberitahukan jadwal *updating* sehingga satker dapat menghindari kesalahan penggunaan pada aplikasi SAKTI.